

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisikan visi, misi, dan nilai-nilai instansi, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya, serta diharapkan dapat memberikan pedoman, arah, dan tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan pertanian khususnya subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta urusan ketahanan pangan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Dalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah. Adapun secara detil beberapa dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah di sesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Dengan diterbitkannya peraturan tersebut jelas berdampak dengan berubah struktur keuangan yang ada di daerah ditambah dengan adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam kepmendagri nomor 050-3708 sehingga perlu penyesuaian di dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Pandemi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah merubah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah; Adanya Pandemi covid 19 ini sudah merubah kebijakan perencanaan dan

penganggaran di RKPD sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang sedianya dalam rangka percepatan pencapaian visi misi kepala daerah harus dikurangi anggarannya atau bahkan dialihkan anggarannya untuk penanganan wabah covid 19. Mengingat dampak dari wabah covid 19 ini telah berdampak pada lesunya kegiatan perekonomian karena kebijakan pembatasan social baik skala besar maupun skala kecil, tingkat pengangguran meningkat karena banyak pelaku usaha melakukan PHK untuk menurunkan biaya operasional, naiknya tingkat kriminalitas, serta penanganan pasien yang terinfeksi virus covid 19. Penanganan masa pandemi sampai dengan pasca pandemi covid 19 akan difokuskan pada pemulihan sektor ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dengan memaksimalkan potensi pertanian dan agro wisata, sektor pendidikan, stabilitas wilayah dengan rendahnya kerawanan sosial, memutus mata rantai penyebaran covid 19 dengan penerapan protocol kesehatan yang tertib, sektor kesehatan dengan fokus pada pelayanan masyarakat dengan mempertimbangkan kekuatan anggaran.

Sektor pertanian masih memiliki potensi untuk ditingkatkan apabila berhasil menangani kendala-kendala yang meliputi produktivitas, efisiensi usaha, konversi lahan pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, serta terbatasnya kredit dan infrastruktur pertanian. Pandemi Covid-19 memukul perekonomian dunia pada umumnya serta Indonesia pada khususnya. Hal ini turut mempengaruhi arah kebijakan pemerintah daerah. Penggunaan anggaran pemerintah daerah diutamakan untuk penanganan Covid-19 serta usaha pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan dibanding sektor lain terpuruk akibat Covid-19. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tahan banting dengan berbagai kondisi. Karenanya usaha peningkatan kegiatan di sektor pertanian harus semakin digalakkan.

Untuk menjawab tantangan diatas, disusunlah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman bagi penetapan yang dibutuhkan sesuai dengan tahapan pembangunan. Renstra juga berfungsi sebagai acuan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dalam merencanakan program dan kegiatan tahun 2018-2023. Renstra ini akan selalu disempurnakan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, kebutuhan pembangunan pertanian dan perkembangan kapasitas pengelolaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018- 2023 akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2018-

2023. Selanjutnya Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang berkesinambungan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; yang kemudian disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005– 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.
 11. Peraturan Bupati Magetan nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, khususnya mencakup tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Terkait dengan hal tersebut Renstra ini dimaksudkan untuk menggali, mengelola dan mengerahkan semua potensi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Magetan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah untuk membuat pedoman dan arah strategis yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip *Good Governance* sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kabupaten Magetan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya diperoleh informasi tentang isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB. IV. TUJUAN, DAN SASARAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB. VII. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB. VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan terdiri dari:

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dalam merumuskan perencanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Pertanian.

B. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi, koordinasi, perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga.

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

C. BIDANG SARANA PRASARANA

Bidang sarana prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
- 2) penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- 3) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan irigasi pertanian;
- 4) penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- 5) pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- 6) pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- 7) pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana Prasarana membawahi:

- a. Seksi Lahan
- b. Seksi Irigasi
- c. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin

D. BIDANG TANAMAN PANGAN mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

Fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- 2) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- 3) pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
- 4) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- 5) pemberian bimbingan pascapanen dan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- 6) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- 7) pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Tanaman Pangan membawahi:

- a. Seksi Serealia
- b. Seksi Aneka Kacang dan Umbi
- c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan

E. BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura dan perkebunan.

Fungsi

- 1) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi dan pengolahan di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 2) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 3) pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 4) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 5) pemberian bimbingan pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan;
- 6) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 7) pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura dan perkebunan; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Hortikultura Dan Perkebunan membawahi:

- a. Seksi Sayuran dan Tanaman Obat
- b. Seksi Buah dan Florikultura
- c. Seksi Perkebunan

F. BIDANG KETAHANAN PANGAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

Fungsi:

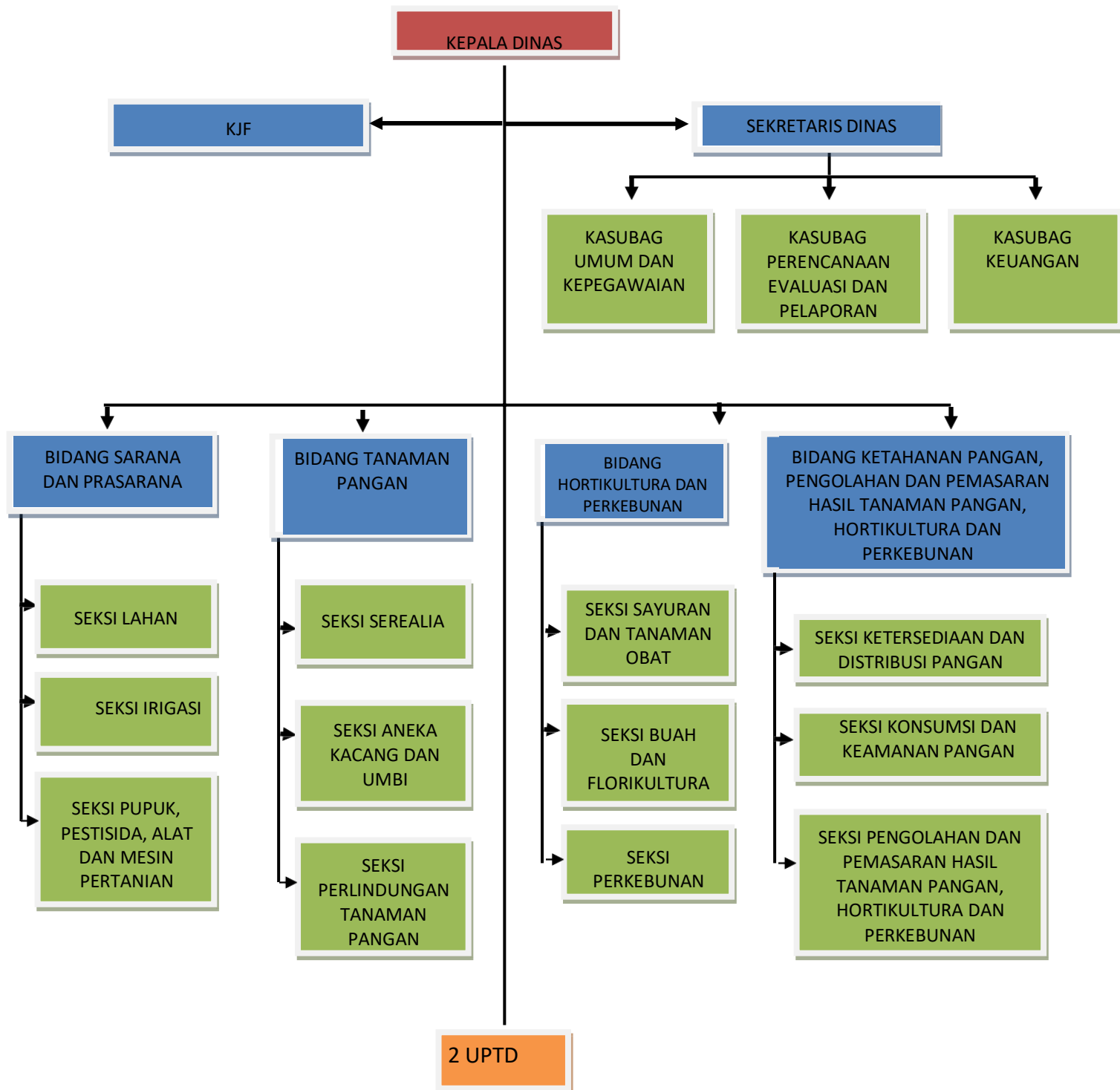
- 1) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 2) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 3) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 5) penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 6) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 7) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 8) penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 9) penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- 10) penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- 11) penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan membawahi:

- a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- G. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai tugas melaksanakan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul serta pengelolaan aset Pemerintah Daerah untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- H. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pertanian dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian.

Gambar 1
**Bagan Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan,
 Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
 Kabupaten Magetan**



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2021, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan memiliki 43 Orang Tenaga Fungsional dan 40 Orang Tenaga Struktural. Data pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	16
3.	Bidang Sarana Prasarana	6
4.	Bidang Tanaman Pangan	6
5.	Bidang Hortikultura dan Perkebunan	6
6.	Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	5
7.	Fungsional	51
8.	Mantri Tani	4
	Jumlah	95

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan

2.2.2. Asset / Modal

Dalam upaya mendukung tugas pokok dan fungsi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan telah memiliki asset/modal diantaranya asset lahan/tanah, bangunan, alat mesin dan lain sebagainya. Sampai dengan tahun 2021 Total Aset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan sebesar Rp. 32.870.447.503. Asset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Asset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Magetan

No.	JENIS	JUMLAH
1.	Tanah	1.870.111.150
2.	Golongan Peralatan dan Mesin	8.156.211.144
	a. Alat-alat Besar	269.377.000
	b. Alat-alat Angkutan	1.864.547.000
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	99.990.000
	d. Alat Pertanian	3.135.174.700
	c. Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.366.793.544
	d. Alat Studio dan Alat Komunikasi	187.020.500
	e. Alat Laboratorium	233.308.400
3.	Golongan Gedung dan Bangunan	10.051.334.459
	a. Bangunan Gedung	10.016.394.459
	b. Monumen	34.940.000
4.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.792.790.750
	a. Jalan dan Jembatan	166.340.900
	b. Bangunan Air/Irigasi	12.119.323.850
	c. Instalasi	507.126.000
	TOTAL	32.870.447.503

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2016, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan memiliki 1 (satu) urusan wajib, yaitu urusan ketahanan pangan, dan 1 (satu) urusan pilihan yaitu urusan pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya (2013-2018) menurut indikator kinerja utama sebagaimana pada tabel 2.3. sedangkan capaian untuk pengelolaan keuangan selama periode 2013 sampai dengan 2018 ditampilkan pada tabel 2.4.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan

NO	INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-		Rasio Capaian Pada Tahun Ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
	PANGAN									
1	Skor Pola Pangan Harapan (SDGs)				89,4	89,5	90,1	84,9	100,78 %	94,86%
2	Penguatan cadangan pangan				75	80	58,30	98,6	77,73%	123,25%
3	Penanganan daerah rawan pangan				20	40	20	40	100%	100%
	PERTANIAN									
1	Nilai PDRB Sektor Pertanian				3.652.424,43	3.750.260,12	3.517.329,50	3.602.281,8	96,30%	96,05%
	Produksi pertanian									
	• Padi (kw)				3.494.720	3.533.460	3.960.670	3.944.68	113,3%	111,63%

							6			
	• Jagung (kw)				1.103.300	1.112.960	995.700	1.221.972	90,24%	109,79%
	• Kedelai (kw)				3.494.720	3.533.460	45.840	7179	1,31%	0,2%
	• Ubi Jalar (kw)				24.150	26.250	430.780	351.110	17837%	1337%
	• Kelapa (kg)				1.231.500	1.231.800	922.000	727.000	74,86%	59,01%
	• Kopi (kg)				199.000	204.000	219.000	226.000	110,01%	110,78%
	• Kakao (kg)				290.000	300.000	310.812	334.000	107,18%	111,33%
	• Tebu (kw)				535.350	541.800	428.663	412.881	80,07%	76,21%
	• Tembakau (kw)				2.468	2.492	3630	2480	147,08%	99,52%
	• Jeruk Besar (kw)				189.651	191.547	262.050	149.380	138,17%	77,99%
	• Stroberi (kw)				176	178	141	116	80,11%	65,17%
	• Sayuran (Bw. Merah, Bw. Putih, Cabe, Kentang, Wortel) (kw)				319.059	322.250	418.738	332.483	131,24%	103,18%

Berdasarkan tabel T-C.23. untuk masing – masing indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Magetan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Urusan Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu indikator untuk mengukur ketahanan pangan melalui pencapaian nilai ragam konsumsi pangan dan gizi seimbang. Pola Pangan Harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi konsumsi pangan penduduk baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dapat mengantisipasi adanya gizi buruk serta beragam penyakit yang disebabkan olehnya. Skor PPH yang tinggi menjadi situasi yang hendak dicapai oleh setiap pemerintah daerah dan pusat. Penganekaragaman Konsumsi Pangan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan skor PPH sehingga dapat menambah kualitas hidup masyarakat melalui konsumsi pangan yang cukup gizi secara kuantitas dalam komposisi yang seimbang bagi setiap individu. Nilai capaian peningkatan skor PPH didapat melalui komposisi kelompok pangan utama untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Apabila skor PPH semakin tinggi, maka konsumsi pangan akan semakin beragam, bergizi dan seimbang.

Skor pola pangan harapan Kabupaten Magetan dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan. Penurunan sebanyak 5,2 poin ini disebabkan pada taun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian masyarakat. Hal ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Tak terkecuali pada pemenuhan pangan masyarakat. Terjadi penurunan baik dalam hal jumlah dan ragam konsumsi masyarakat.

B. Urusan Pertanian

Selama periode tahun 2019-2020 untuk capaian kinerja urusan pertanian dijelaskan sebagai berikut :

1. PDRB pertanian
Walaupun tidak mencapai target, namun secara umum PDRB di sektor pertanian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,4% dibanding tahun 2019. Sektor pertanian merupakan salah satu dari sedikit sektor yang tetap mengalami kenaikan disaat sektor lain mengalami penurunan. Covid-19 telah menyebabkan pelambatan ekonomi.
2. Produksi Padi
Produktivitas hasil pertanian khususnya padi pada periode tahun 2019-2020 di wilayah Kabupaten Magetan mengalami kenaikan sebesar 11,68%. Kenaikan produktivitas dari tahun ke tahun disebabkan karena adanya program SL (Sekolah Lapang) budidaya padi yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh para penyuluh pertanian kepada para petani. Dalam kegiatan tersebut dilakukan transfer informasi tentang teknologi budidaya yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan produksi padi. Disamping itu adanya teknologi Jajar Legowo (Jarwo) yang diterapkan oleh petani yang telah mendapatkan pelatihan.
3. Produksi Jagung
Untuk komoditas jagung pada tahun 2019 tidak mencapai target, namun untuk tahun 2020 justru melebihi target. Rendahnya produksi pada tahun 2019 disebabkan karena panjangnya musim kemarau. Hal ini tidak terjadi pada tahun 2020. Akibatnya target produksi dapat tercapai.

4. **Produksi kedelai**
Pada komoditas kedelai terdapat kesalahan penetapan target yang menyebabkan capaian produksi sangat rendah. Target ini akan diperbaiki saat perubahan Renstra ini.
5. **Produksi Ubi jalar**
Terdapat kesalahan penulisan satuan pada komoditas ubi jalar. Seharusnya satuan yang digunakan adalah ton, namun yang tertulis adalah kwintal. Akibatnya persentase capaian menjadi sangat tinggi. Satuan ini akan disesuaikan pada saat perubahan Renstra ini.
6. **Produksi Tebu**
Baik pada tahun 2019 maupun 2020 target produksi tebu tidak tercapai. Namun tetap terjadi kenaikan produksi dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini dikarenakan alih fungsi lahan. Disamping itu, banyak tanaman tebu yang sudah menurun produksinya dan membutuhkan bongkar ratoon.
7. **Produksi Jeruk besar**
Tahun 2019 komoditas jeruk besar melebihi target produksi namun produksi ini mengalami penurunan drastis sebesar 112.670 kw atau sebesar 60,18%. Hal ini terjadi karena kemarau panjang yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018 yang menyebabkan banyak tanaman jeruk yang dibongkar.

	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	825.000.000	770.250.000	805.763.976	750.754.188	97,67%	97,47%		- 0,07
	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	225.000.000	87.500.000	224.439.941	76.908.405	99,75%	87,90%		- 1,57
	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000	14.520.250	19.980.000	10.920.250	99,90%	75,21%		- 0,38
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	Pembangunan gedung kantor	1.360.000.000	329.786.652	1.342.374.690	320.130.000	98,70%	97,07%		- 3,12
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	675.000.000	20.000.000	662.775.500	15.092.400	98,19%	75,46%		- 32,75
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	250.000.000	131.700.000	248.220.841	112.936.243	99,29%	85,75%		- 0,90
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pekarangan Kantor Dinas		9.750.000		9.750.000		100,00%		1,00

	Pengadaan Perlengkapan Kantor	250.000.000	12.867.000	240.127.800	11.962.800	96,05%	92,97%		- 18,43
	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	45.000.000	24.250.000	42.064.300	24.249.400	93,48%	100,00%		- 0,86
	Pembangunan gedung Balai Penyuluh Pertanian	1.500.000.000	249.539.506	1.379.925.600	246.304.000	92,00%	98,70%		- 5,01
	Pengadaan perlengkapan balai penyuluhan pertanian	878.170.000	27.300.000	684.422.500	-	77,94%	0,00%		- 31,17
	Pembangunan gedung balai penyuluhan pertanian (BU dan pendamping DAK)		54.000.000		44.524.200		82,45%		1,00
4	Program penyuluhan Sumber Daya Aparatur								
	Pendidikan dan pelatihan formal	25.000.000	9.500.000	22.759.600	8.113.000	91,04%	85,40%		- 1,63
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75.000.000		66.513.120		88,68%			

	Program Peningkatan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	12.340.100	19.745.000	12.239.350	98,73%	99,18%		- 0,62
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	160.000.000	83.912.500	154.954.500	81.167.500	96,85%	96,73%		- 0,91

5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								
	Peningkatan kemampuan lembaga petani	75.000.000	60.900.000	74.049.000	60.721.650	98,73%	99,71%		- 0,2 3
6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan								
	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	675.000.000	169.904.750	661.974.150	165.015.600	98,07%	97,12%		- 2,9 7
	Pengembangan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	2.095.000.000	586.275.000	2.072.942.492	576.287.335	98,95%	98,30%		- 2,5 7
7	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan								

	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	1.210.000.000	1.769.827.900	1.163.613.149	1.654.864.401	96,17%	93,50%		0,32
8	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan								
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	570.000.000	426.400.000	566.377.700	421.062.450	99,36%	98,75%		- 0,3 4

9	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Bidang Pertanian								
	Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau	102.600.000	99.318.000	102.515.000	60.560.900	99,92%	60,98%		- 0,0 3
	Penanganan panen dan pasca panen	400.000.000	275.000.000	363.285.000	251.327.750	90,82%	91,39%		- 0,4 5
	Dukungan sarana dan prasarana usahatani tembakau	230.000.000	255.000.000	222.913.200	250.265.850	96,92%	98,14%		0,10
	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan	120.000.000	120.000.000	119.930.000	86.841.100	99,94%	72,37%		-
	Penerapan inovasi teknis	50.000.000	150.682.000	50.000.000	26.256.800	100,00%	17,43%		0,67
10	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan								
	Peningkatan produksi, Produktivitas dan Produk Sereal	1.085.000.000	500.000.000	1.055.321.100	488.136.250	97,26%	97,63%		- 1,1 7
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu aneka kacang dan Umbi	300.000.000	115.000.000	292.011.000	110.480.000	97,34%	96,07%		- 1,6 1

	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Tanaman Pangan	400.000.000	101.376.850	397.108.650	101.208.850	99,28%	99,83%		- 2,9 5
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	--------	--	---------------

11	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura								
	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk buah-buahan	3.180.000.000	1.780.302.950	3.044.340.900	1.549.736.375	95,73%	87,05%		- 0,7 9
	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Florikultura	550.000.000	382.373.500	531.259.000	337.842.450	96,59%	88,35%		- 0,4 4
	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Sayuran	425.000.000	216.807.000	419.798.000	206.903.250	98,78%	95,43%		- 0,9 6
	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Biofarmaka	300.000.000	199.300.000	117.485.000	170.876.450	39,16%	85,74%		- 0,5 1
12	Program Peningkatan Produksi/Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan								
	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk tanaman semusim	300.000.000	21.577.500	258.004.000	21.577.500	86,00%	100,00%		- 12,9 0

	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Tanaman Tahunan	110.000.000	84.925.300	105.900.000	82.365.000	96,27%	96,99%		- 0,30
	Penanganan pasca panen hasil perkebunan	50.000.000	23.575.000	48.594.000	23.507.500	97,19%	99,71%		- 1,12
13	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan								
	Peningkatan Sarana Prasarana Lahan (Rehab Jalan Usaha Tanidan Jalan Produksi)	9.169.800.00	8.761.300.00	8.936.439.95	8.573.798.791	97,46%	97,86%		- 0,05
	Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi	15.763.900.00	10.685.935.00	15.427.885.17	10.534.831.844	97,87%	98,59%		- 0,48
	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian (LP2B)	305.000.000	308.000.000	259.951.500	307.072.620	85,23%	99,70%		0,01
	Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi (DAK)	2.117.750.00	1.880.000.00	2.096.924.945	1.880.000.000	99,02%	100,00%		- 0,13
	Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan	442.500.000	370.000.000	372.777.739	345.018.700	84,24%	93,25%		- 0,20
	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	180.000.000	54.928.050	177.336.000	51.747.655	98,52%	94,21%		- 2,28

	Pendampingan Pembiayaan Pertanian/Perkebunan (Pinjaman Daerah)	100.000.000	25.000.000	92.677.037	8.852.950	92,68%	35,41%		- 3,00
	Rehabilitasi Jalan Usahat Tani dan Produksi (DID Tambahan)		600.000.000		595.066.000		99,18%		1,00
	Biaya Pendamping Rehabilitasi Jalan Usaha Tani dan Produksi DID-T(DAU)		25.000.000		22.919.750		91,68%		1,00
	Pengadaan Prasarana Pertanian / Perkebunan (DID Tambahan)		4.800.000.000		4.435.556.250		92,41%		1,00
	Biaya Umum Pendamping Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian DID-T (DAU)		174.000.000		146.550.000		84,22%		1,00
14	Program Pengembangan Agrowisata								
	Penyediaan sarana prasarana agrowisata	900.000.000	3.745.525.250	840.658.420	3.368.514.723	93,41%	89,93%		0,76
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Agrowisata (DID Tambahan)		430.000.000		423.275.000		98,44%		1,00
15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Miskin								

	Belanja bantuan sosial kepada petanimiskin	500.000.000	500.000.000	8.042.500	432.933.350	1,61%	86,59%		-
	JUMLAH	49.018.720.000	44.240.221.908	46.729.668.375	42.060.087.742	95,33%	95,07%		-0,11

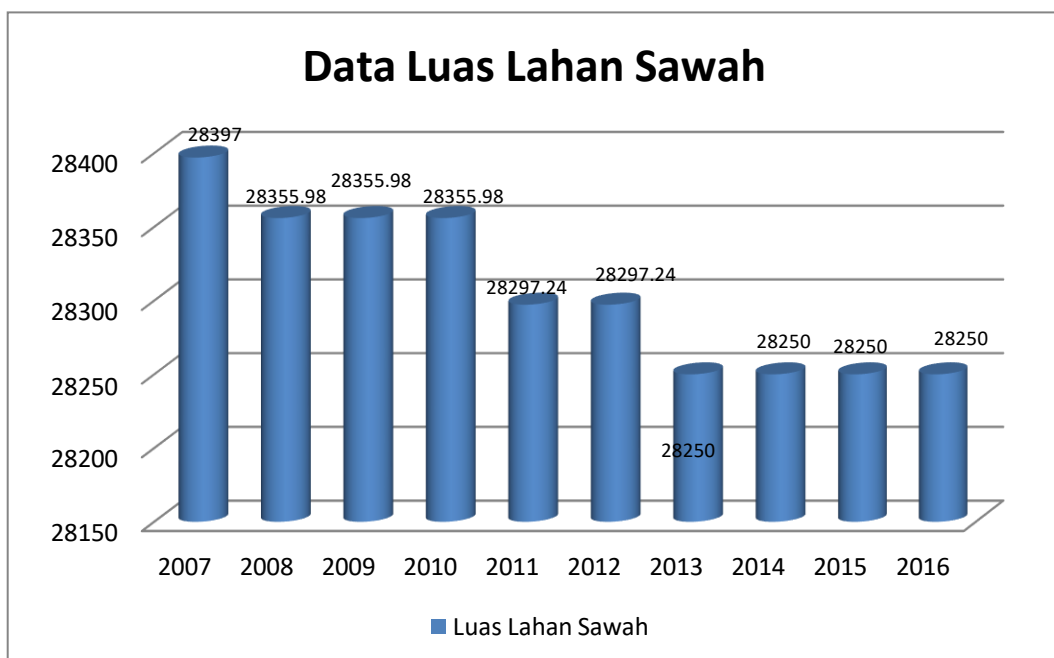
Secara umum pertumbuhan anggaran dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan terjadi karena terjadi refocussing beberapa kali untuk penanganan Covid-19.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten sebagai lumbung pangan Jawa Timur. Berdasarkan data potensi wilayah, sebagian besar wilayah di Kabupaten Magetan merupakan wilayah potensi pertanian terutama tanaman pangan dan hortikultura sehingga merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Magetan.

Selama ini, pertumbuhan produksi pertanian di Kabupaten Magetan masih berbasis pada ketersediaan lahan dan pertumbuhan produktivitas masih mengalami peningkatan. Namun ketersediaan lahan selama 10 tahun terakhir cenderung menurun. Penyebab utamanya adalah, alih fungsi lahan pertanian dari beberapa kegiatan ekonomi yang masih terus berlangsung sehingga perkembangan luasan lahan pertanian setiap tahun berubah peruntukannya.

Gambar 2. Luas Lahan Sawah di Kabupaten Magetan, tahun 2007 – 2016



Perkembangan luas lahan sawah di Kabupaten Magetan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magetan selama Tahun 2007 – 2016 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2007 menunjukkan luas lahan sawah seluas 28.397 hektar tetapi pada tahun 2016 berkurang menjadi seluas 28.250 hektar. Hal ini terjadi pengurangan luas lahan sawah sebesar 147 hektar selama kurun waktu 10 tahun.

Tantangan pembangunan pertanian ke depan dari infrastruktur dan prasarana serta sarana pertanian di Kabupaten Magetan yaitu bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim; mengupayakan dukungan alat mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah jaringan irigasi tersier yang telah diperbaiki sebanyak 104 titik di 18 kecamatan dengan

volume + 19.400 m yang dapat mengairi 485 ha sawah. Tentunya jumlah ini masih kurang mencukupi dibandingkan luas lahan sawah yang ada di Kabupaten Magetan yakni seluas 28.269 hektar.

Sebagaimana hasil telaahan terhadap RTRW, sinkronisasi dan keselarasan dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dengan RTRW telah dilakukan untuk menjamin kepastian dalam aspek spasial (keruangan), sektoral, tata guna lahan, serta aspek lain yang terkait dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Hasil telaah atas dokumen-dokumen tersebut yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

Berdasarkan hasil kajian/telaah atas peluang dan tantangan dalam 5 tahun kedepan yang dihadapi berkaitan dengan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dituangkan sebagai berikut:

- a. Tantangan yang dihadapi diantaranya :
 1. Ketersediaan air
 2. Perbaikan infrastruktur lahan dan air, perbenihan/perbibitan
 3. Peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian
 4. Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam yang menyebabkan turunnya daya dukung alam
 5. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian (pemukiman dan industri)
 6. Menurunnya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian
 7. Penerapan pertanian dengan prinsip ramah lingkungan
 8. Penanganan pascapanen serta pemberian nilai tambah pada produk pertanian
 9. Belum optimalnya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
 10. Penerapan teknologi di bidang pertanian
- b. Peluang dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Magetan
 1. Daya beli masyarakat yang terus meningkat serta jumlah penduduk yang terus meningkat besar merupakan pasar dalam negeri yang sangat potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani
 2. Peluang investasi dibidang agroindustri dan agribisnis cukup besar;
 3. Tersedianya fasilitas permodalan dari Bank/Lembaga Keuangan non-Bank;
 4. Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/kelompok tani dengan pengusaha/ produsen;
 5. Terdapat kesenjangan antara produksi potensial dan aktual.
 6. Kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang makin konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan diperlukan dalam rangka pembangunan pertanian 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Magetan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • pembatasan alih fungsi lahan pertanian dengan regulasi yang ada (RTRW), LP2B • Pembinaan tentang pelestarian lahan pertanian • Pembangunan sektor jasa, industri dan pemukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magetan sedang disusun dan belum diterapkan • Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan produksi pertanian.
2	Infrastruktur pertanian yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian • Terjadinya kerusakan infrastruktur pertanian • Swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan • Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani
3	Sarana pertanian yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyediaan sarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dukungan dana untuk pengadaan • Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai

			rekomendasi
4	Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pendampingan Kelompok Tani yang ada belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target
5	Adanya Anomali iklim, bencana dan serangan OPT	<ul style="list-style-type: none"> • Antisipasi dan mitigasi bencana alam belum optimal • Fasilitasi pengendalian OPT • SLPHT belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir,kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi
6	Rendahnya posisi tawar petani	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme harga pasar • Adanya perdagangan bebas • Kebijakan penetapan harga dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak
7	Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme harga pasar • Adanya perdagangan bebas • Kebijakan penetapan harga dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak
8	Keterbatasan SDM pelaksana (Petani dan petugas)	<ul style="list-style-type: none"> • Umur dan tingkat pendidikan petani • Formasi petugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan PanganPertanian kurang dari kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi • Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian
9.	Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani. • Perlunya pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis pangan lokal • Perlunya peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana. • Perlunya penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi penetapan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai salah satu tujuan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 • Perlunya penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK dan Dasa Wisma dalam pengawasan dan pemantauan tumbuh kembang anak serta tindak lanjut (rujukan) masalah gizi buruk

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, dimana pada RPJM Daerah tersebut telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagai berikut:

“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”

Misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas, adapun misi tersebut terdiri dari :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yang termuat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan dan mengacu pada tugas dan fungsinya, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan akan mendukung terlaksananya visi dan misi bupati terutama misi kesatu yaitu meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil) dan misi kedua yaitu meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

Untuk mendukung misi pertama bupati Magetan yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM dan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dimana strategi dan arah kebijakannya yaitu pemenuhan gizi masyarakat yang sehat dan terjangkau maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan adalah peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan.

Melalui misi kedua tersebut terutama tujuan kedua yaitu memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya kegiatan sektor pertanian.

Tabel 3.2
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bupati Magetan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Program	Indikator Program
-1	-1	-2	-3			-4	-5
Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (sehat, maju, agamis, ramah dan trampil)	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketersediaan dan Konsumsi Pangan	Meningkatkan stok pangan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan pemenuhin gizi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Ketersediaan energi dan protein Persentase Konsumsi energi dan protein 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> kebijakan Dewan Ketahanan Pangan kabupaten Skor Pola Pangan Harapan Tertanganinya kerawanan pangan Terpantaunya keamanan pangan segar

Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah	Meningkatnya kegiatan sektor pertanian	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatkan produksi pertanian	1. Penetapan kawasan LP2B untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian yang subur menjadi lahan non pertanian serta menjamin ketersediaan lahan pertanian	1. Produksi padi 2. Produksi jagung 3. Produksi tebu 4. Produksi pabello	<ul style="list-style-type: none"> • Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian • Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian • Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah produksi padi dan pabello • Indeks pertanaman • Terkendalinya luas tanaman yang terserang OPT
				2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana produksi pertanian	3. Peningkatan penanganan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah produksi pertanian	4. Peningkatan keberdayaan petani melalui peningkatan SDM dan mendorong	Program Penyuluhan Pertanian

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Program	Indikator Program
				terbentuknya korporasi petani			
		Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan Daerah yang didukung oleh tripel agro (agrowisata, agroindustri dan agrobisnis)	Mengembangkan agrowisata buah, sayur dan bunga	Destinasi Agrowisata	<ul style="list-style-type: none"> • Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks pertanaman 	
		Pemberdayaan petani/buruh tani	Pembinaan dan pemberian sarana produksi pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan dan usaha perdagangan	Persentase petani miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penanganan Kerawanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tertanganinya kerawanan pangan 	

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas TPHPK P	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi ke 1 : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (sehat, maju, agamis, ramah dan trampil)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Program penanganan kerawanan pangan • Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan • Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat • Program pengawasan keamanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga bahan pangan masih fluktuatif • Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu • Kinerja petugas belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah adanya program peningkatan produksi pangan • Ketersediaan komoditas pangan surplus • Pelatihan yang terintegrasi
2.	Misi ke 2 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah			

<ul style="list-style-type: none"> • Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semakin tingginya alih fungsi lahan ▪ Belum optimalnya produksi dan produktivitas ▪ Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak ▪ Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas pertanian yang mudah rusak menyebabkan harga produk yang rendah ▪ Menurunnya daya dukung sumber daya alam mengakibatkan anomali iklim dan degradasi lahan ▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan petani yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang optimalnya penggunaan teknologi pertanian ▪ Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran ▪ Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak ▪ Rendahnya Penggunaan pupuk/pestisida hayati ▪ Kebutuhan petani akan ketersediaan air di beberapa daerah kering 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan 2012—2032 ▪ Tersedianya dukungan dana (hibah) sarana produksi ▪ Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi produk pertanian
<ul style="list-style-type: none"> • Program penyuluhan pertanian 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyaknya jumlah petani dengan kualitas SDM yang bervariasi dan rata-rata masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan lembaga tani
<ul style="list-style-type: none"> • Program penyediaan dan pengembangan prasarana 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan

	<ul style="list-style-type: none"> • Program penanggulangan bencana 	<p>tingginya alih fungsi lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana infrastruktur pertanian yang terbatas di beberapa daerah tertentu ▪ Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian dan tingginya alih fungsi lahan ▪ Terbatasnya jumlah produksi Agensia Hayati 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pengendalian OPT sarana masih kurang memadai 	<p>Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikembangkan ya agensia hayati
--	--	--	--	---

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
**Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Magetan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disusunnya Raperda LP2B
		<p>pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani ▪ Keterbatasan sarpras menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi ▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan 	<p>pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian ▪ Banyaknya jumlah petani dengan kualitas SDM yang bervariasi dan rata-rata masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ▪ Pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan lembaga tani

		<p>target</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya kualitas SDM Pertanian ▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir,kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan SL Iklim dan Pemberdayaan Regu Perlindungan Tanaman
	Peningkatan Diversifikasi Pangan	Kegiatan usaha tani sebagian besar masih bersifat subsistem dengan komoditas utama berupa bahan pangan pokok (padi)	Pola pikir/anggapan belum makan kalau belum makan nasi	Adanya sosialisasi dan penggalakan konsumsi pangan lokal
	Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran ▪ Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas pertanian yang mudah rusak menyebabkan harga produk yang rendah ▪ Daya saing produk pertanian yang relatif rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkembangnya pasar bebas 	<p>produk pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sertifikasi produk pertanian
	Peningkatan kesejahteraan petani	Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha	Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha tani	Kebijakan pemerintah tentang peluncuran berbagai program kredit pertanian

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur				
1	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Kegiatan usaha tani sebagian besar masih Bersifat subsistem Dengan komoditas utama berupa bahan pangan pokok (padi)	Pola pikir/anggapan belum makan kalau belum makan nasi	Adanya sosialisasi dan penggalakan konsumsi pangan lokal
2	Mempertahankan swasembada Padi dan jagung secara berkelanjutan dan mewujudkan swasembada kedelai dan tanaman Pangan Utama Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian ▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani ▪ Keterbatasan sarpras menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi ▪ Kurang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pembangunan sektornon pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian ▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal cetak sawah baru ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ▪ Pelaksanaan SLIKlim dan Pemberdayaan Regu perlindungan tanaman

		optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan		
		kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi 		
3	Pengamanan dan peningkatan produksi serta peningkatan nilai tambah melalui penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak ▪ Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas pertanian yang mudah rusak menyebabkan harga produk yang rendah ▪ Daya saing produk pertanian yang relatif rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran ▪ Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak ▪ Berkembangnya pasar bebas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi produk pertanian ▪ Sertifikasi produk pertanian
4	Peningkatan Mutu Produk dan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan	Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha	Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha	Kebijakan pemerintah tentang peluncuran berbagai program kredit pertanian
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur				

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan ▪ Mengoptimalkan pengembangan perkebunan di lahan marginal ▪ Mempertahankan existing lahan history perkebunan ▪ Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal cetak sawah baru
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengoptimalkan pengendalian hama penyakit dan gangguan usaha perkebunan ▪ Meningkatkan pengawasan pemakaian dan peredaran benih perkebunan ▪ Meningkatkan ketersediaan benih perkebunan unggul dan bermutu ▪ Meningkatkan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan ▪ Meningkatkan kapasitas SDM dalam proses pasca panen Perkebunan ▪ Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani perkebunan secara berkelanjutan ▪ Meningkatkan Sekolah Lapang Perkebunan ▪ Meningkatkan fasilitasi kelembagaan petani perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani ▪ Keterbatasan sarpras menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi ▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target ▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian ▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ▪ Pelaksanaan SL Iklim dan Pemberdayaan Regu Perlindungan Tanaman

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

4.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan telaahan terhadap rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magetan

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pertanian	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasaan Andalan	a. Barat b. Kartoharjo c. Karangrejo d. Maospati e. Takeran f. Nguntoronadi g. Plaosan h. Panekan i. Sidorejo j. Takeran k. Poncol	a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/ Perkebunan	Adanya Kebutuhan Ketersediaan Sumberdaya Manusia, Sumberdaya alam dan Sumberdaya Buatan.	a. Barat (Padi, Kedelai) b. Kartoharjo (Padi, Kedelai) c. Karangrejo (padi) d. Maospati (Padi) e. Takeran (Padi) f. Nguntoronadi (Padi) g. Plaosan (Jagung, Ubi Jalar) h. Panekan (Ubi Jalar, Ubi Kayu, Jagung) i. Sidorejo (Ubi Jalar) j. Takeran (Kedelai) k. Poncol (Jagung)

Tabel 3.7
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magetan

No.	Rencana Struktur Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pertanian	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Andalan	Pemanfaatan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian d. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan 	Adanya Kebutuhan Ketersediaan Sumberdaya Manusia, Sumberdaya alam dan Sumberdaya Buatan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Plaosan (Hortikultura) b. Sidorejo (Hortikultura) c. Poncol (Hortikultura) d. Panekan (Hortikultura) e. Bendo (Jeruk Pamelos) f. Takeran (Jeruk Pamelos) g. Sukomoro (Jeruk Pamelos) h. Kawedanan (Jeruk Pamelos) i. Maospati (Jeruk) j. Nguntorondi (Jeruk)

Tabel 3.8
Hasil Telaahan Tata Ruang Wilayah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan terhadap RTRW Kabupaten Magetan

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>a. Kawasan Andalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barat (Padi, Kedelai) • Kartoharjo (Padi, Kedelai) • Karangrejo (padi) • Maospati (Padi) • Takeran (Padi) • Nguntoronadi (Padi) • Plaosan (Jagung, Ubi Jalar) • Panekan (Ubi Jalar, Ubi Kayu, Jagung) • Sidorejo (Ubi Jalar) • Takeran (Kedelai) • Poncol (Jagung) <p>b. Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaosan (Hortikultura) • Sidorejo (Hortikultura) • Poncol (Hortikultura) • Panekan (Hortikultura) • Bendo (Jeruk Pamelon) • Takeran (Jeruk Pamelon) • Sukomoro (Jeruk Pamelon) • Kawedanan (Jeruk Pamelon) • Maospati (Jeruk) • Nguntoronadi (Jeruk) 	<p>d. Alih Fungsi Lahan yang bukan menjadi kewenangan Dinas TPHPKP</p>	<p>a. Semakin tingginya alih fungsi lahan</p> <p>b. Keterbatasan permodalan petani</p>	<p>a. Penerapan teknologi ramah lingkungan</p> <p>b. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian</p>

Meningkatnya alih fungsi lahan akan menyebabkan kerusakan lingkungan dimana kawasan yang semula merupakan kawasan untuk konservasi menjadi lahan budidaya yang menyebabkan kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air menjadi berkurang dan rusaknya struktur tanah sehingga dalam jangka panjang akan berpotensi menyebabkan meningkatnya erosi dan banjir. Dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pemanfaatan lahan perlu disusun suatu arahan perencanaan dan program yang meliputi :

- A. Arahan rencana pengendalian kawasan terbangun, meliputi :
 - a. Pembatasan pembangunan pada kawasan konservasi dan lahan pertanian produktif
 - b. Pengetatan aturan dan perijinan yang berhubungan dengan alih fungsi lahan (Perda c.IMB) untuk kawasan terbangun.
 - b. Sistem reward dan punishment untuk mengurangi terjadinya alihfungsi lahan dengan sanksi yang tegas.
- B. Arahan rencana pengendalian alih fungsi lahan meliputi :
 - a. Program alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.
 - b. Perlindungan dan pencegahan alih fungsi lahan pada kawasan

lindung dan konservasi.

4.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau program. Telaahan terhadap KLHS merupakan bentuk sinkronisasi agar dalam penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan tidak terlepas dengan hasil kajian yang tertuang dalam KLHS. Dengan kata lain hasil KLHS merupakan dasar dalam penyusunan Renstra.

Tabel 3.9

Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Berdasarkan Analisa KLHS Kabupaten Magetan

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang dan berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan	Harga bahan pangan masih fluktuatif	Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	Sudah adanya program peningkatan produksi pangan Ketersediaan komoditas pangan surplus
		Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Kinerja petugas belum optimal	Pelatihan yang terintegrasi

Telaahan KLHS yang telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan bersamaan dengan penyusunan RPJMD tahun 2018-2023 mengidentifikasi intensitas keterkaitan antara Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 dengan isu strategis yang telah teridentifikasi. Khusus untuk Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam kajian KLHS yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas adalah Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang dan berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan. Adapun rekomendasi terhadap hal tersebut antara lain :

1. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.
2. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

3.5. Penentuan isu-isu Strategis

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan pertanian untuk 5 tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Pada tahun 2020 – 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi yakni jumlah penduduk Indonesia yang berada pada usia produktif (15-65 tahun) mencapai 70 persen, sementara sisanya 30 persen adalah usia nonproduktif (< 15 th dan >65 th). Bonus demografi ini bisa menjadi peluang juga dapat menjadi ancaman apabila tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dan memadai serta pada saat yang sama perlu dilakukan penyiapan sumber daya generasi muda yang berkualitas. Bagi sektor pertanian hal ini juga bisa menjadi ancaman manakala yang terjun ke sektor pertanian hanya berasal dari sisa bonus demografi (kualitas rendah) sehingga malah akan menyebabkan semakin menurunnya produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian. Untuk itu, menjadi tantangan pemerintah untuk menyediakan tenaga kerja pertanian yang mampu menguasai teknologi pertanian dan mau terjun ke bidang pertanian.

Sehubungan dengan revolusi industri 4.0 yang sedang terjadi, peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan edukasi yang cukup bagi para petani agar dapat memasarkan hasil pertanian dan turunannya lebih cepat melalui jaringan digital.

Idealnya, di era revolusi industri saat ini, petani dapat memasarkan sendiri hasil pertaniannya. Berbagai aplikasi bermunculan untuk membantu petani dalam memasarkan hasil pertaniannya. Namun hal tersebut tidak efektif karena petani masih banyak petani yang kurang melek teknologi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain untuk mengelola hasil pertanian yang lebih efektif dan *profitable* dengan mengkolaborasikan petani yang sudah mempunyai pengalaman dan ketrampilan dengan pemuda yang melek teknologi sebagai agen pemasaran hasil pertanian dalam suatu kelompok.

Dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan pertanian lima tahun mendatang adalah:

1. Pencegahan terjadinya alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan sektor non pertanian
2. Pemantapan produksi terutama pada komoditas tanaman pangan utama padi dan jagung melalui penerapan teknologi

- pertanian sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan .
3. Pengurangan dampak adanya gejala perubahan iklim akibat pemanasan global
 4. Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Pertanian baik SDM petugas maupun SDM petani.
 5. Pencegahan dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
 6. Peningkatan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian.
 7. Peningkatan Kesejahteraan Petani.
 8. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
 9. Penguatan tata kelola perkebunan berbasis masyarakat.
 10. Harga pangan pokok masih fluktuatif
 11. Peningkatan pola konsumsi pangan
 12. Peningkatan ketersediaan pangan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sejalan dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dan mengacu pada tugas dan fungsinya, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan akan mendukung terlaksananya visi dan misi bupati terutama misi kedua yaitu meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

Melalui misi kedua tersebut terutama tujuan kedua yaitu memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya kegiatan sektor pertanian maka tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya kegiatan sektor pertanian
2. Peningkatan ketahanan Pangan Masyarakat

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Ketahanan pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan	Persentase Ketersediaan energi (%)	100	100	100	100	100
			Persentase Ketersediaan protein (%)	100	100	100	100	100
			Persentase Konsumsi energi (%)	100	100	100	100	100
			Persentase Konsumsi protein (%)	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan kegiatan sektor pertanian	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi Padi (kw)	3.494.720	3.533.460	3.968.594	3.972.562	3.976.534
			Produksi Jagung (kw)	1.103.300	1.112.960	1.122.660	1.132.400	1.142.180
			Produksi Pamelon (kw)	189.651	191.547	262.574	262.836	263.098
			Produksi Tebu (kw)	535.350	541.800	548.250	554.700	561.225
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat			77 angka	78 angka	79 angka

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan dapat dilihat tabel 5.1. dibawah.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera				
MISI 1 : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan	Peningkatan cadangan pangan dan panganekaragaman konsumsi pangan	Pengembangan lumbung pangan dan diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal
MISI 2 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kegiatan sektor pertanian	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Meningkatkan Luas Tanam	1. Meningkatkan pelayanan irigasi
			2. Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2. Penerapan Teknologi Budidaya
				3. Peningkatan keberdayaan petani melalui peningkatan SDM dan mendorong terbentuknya korporasi petani
				4. Peningkatan penanganan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah produksi pertanian
				5. Peningkatan pemasaran hasil pertanian/ perkebunan

			3. Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan Daerah yang didukung oleh tripel agro (agrowisata, agroindustri dan agrobisnis)	Mengembangkan agrowisata buah, sayur dan bunga
			4. Pemberdayaan petani miskin/buruh tani	Pembinaan dan pemberiansarana produksi pertanian/perkebunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Penyusunan program pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Magetan untuk tahun 2018 – 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan serta sesuai dengan visi “Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera” dengan misi “Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah”. Dari visi dan misi tersebut dijabarkan dalam program-program sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
3. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
4. Program penanganan kerawanan pangan
5. Program pengawasan keamanan pangan
6. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
7. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
8. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
9. Program penyuluhan pertanian

Program-program tersebut diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan dengan mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan.

6.2 Rencana Kegiatan

Untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah disampikan pada bab 2, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
 - a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik
 3. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan
 - Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal
 - Pemantauan stok pasokan dan harga pangan
 - Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan
 - b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi
 - Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun
 - Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
 4. Program penanganan kerawanan pangan
 - a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan
 - b. Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota
 - Pelaksanaan pengadaan pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu kabupaten/kota
 5. Program pengawasan keamanan pangan
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten / kota
 - Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/ kota
 6. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
 - a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian
 - Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
7. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pengelolaan LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
 - Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 8. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
 9. Program penyuluhan pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa
 - Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa

Tolok ukur kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan selama periode waktu tahun 2018 – 2023 dijabarkan dalam tabel T-C.27. berikut.

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
Sebelum Perubahan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkannya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan	02.01.01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama/beras Kuintal	2.161.393	2.164.530	960.000.000	2.180.215	960.000.000									DINAS TPHPKP	
			2.1.1.1	Pemantauan dan Analisis ketersediaan Pangan Pokok	Jumlah dokumen analisis harga pangan Dokumen	12	12	130.000.000	12	130.000.000									DINAS TPHPKP	
			2.1.1.2	Peningkatan pola Konsumsi Pangan	Skor pola konsumsi pangan Angka	89,3	89,4	350.000.000	89,5	350.000.000									DINAS TPHPKP	
			2.1.1.3	Pengembangan Olahan hasil Pertanian	Jumlah pelatihan olahan pangan orang	30	30	200.000.000	30	200.000.000									DINAS TPHPKP	
			2.1.1.4	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan gabah daerah Ton	15	15	280.000.000	15	280.000.000									DINAS TPHPKP	
	Meningkatkan kegiatan sektor pertanian	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	04.01.01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Miskin	Persentase petani miskin yang mendapatkan bantuan/pembiayaan %	0	20	500.000.000	20	500.000.000									DINAS TPHPKP	
			4.1.1.1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Petani Miskin	Jumlah penerima bantuan sarana produksi pertanian bagi petani/buruh tani miskin orang	0	2000	500.000.000	2000	500.000.000									DINAS TPHPKP	

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
Setelah Perubahan				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	kebijakan DKP kabupaten (dokumen)					1	10.849.315	1	10.849.315	1	10.849.315	1	32.547.945	DINAS TPHPKP		
				<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Rumusan kebijakan DKP kabupaten (kebijakan)					1	10.849.315	1	10.849.315	1	10.849.315	1	32.547.945	DINAS TPHPKP		
				Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Jumlah Rakor dewan ketahanan pangan (kali)					1	10.849.315	1	10.849.315	1	10.849.315	1	32.547.945	DINAS TPHPKP		
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan					89,6	409.643.835	89,7	409.643.835	89,8	409.643.835	89,8	1.228.931.505	DINAS TPHPKP		
				<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	Jumlah buku tentang informasi harga dan stok pangan (buku)					1	90.549.310	1	90.549.310	1	90.549.310	3	271.647.930	DINAS TPHPKP		
				Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Jumlah Buku NBM (buku)					1	11.816.649	1	11.816.649	1	11.816.649	3	35.449.947	DINAS TPHPKP		
				Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan olahan pangan (kelompok)					2	39.388.830	2	39.388.830	2	39.388.830	6	118.166.490	DINAS TPHPKP		

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
				Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	Jumlah buku stok dan harga pangan (buku)					1	27.572.181	1	27.572.181	1	27.572.181	3	82.716.543	DINAS TPHPKP		
				Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Jumlah kecamatan yang terpantau Lumbung pangan Masyarakatnya(kecamatan)					18	11.816.649	18	11.816.649	18	11.816.649	18	35.449.947	DINAS TPHPKP		
				<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</i>	Tercapainya target konsumsi pangan (kkal/kapita perhari dan gr/kapita perhari)					AKE 1900 dan AKP 57	319.049.525	AKE 1900 dan AKP 57	319.049.525	AKE 1900 dan AKP 57	319.049.525	AKE 1900 dan AKP 57	957.148.575	DINAS TPHPKP		
				Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Skor Pola Pangan Harapan (angka)					89,7	208.760.801	89,8	208.760.801	89,9	208.760.801	89,9	626.282.403	DINAS TPHPKP		
				Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Terselenggaranya Pekarangan Pangan Lestari dan Lomba Cipta Menu (kelompok; kali)					2 ; 2	110.288.725	2 ; 2	110.288.725	2 ; 2	110.288.725	6;6	330.866.175	DINAS TPHPKP		
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tertanganinya kerawanan pangan (%)					90	495.452.055	90	495.452.055	90	495.452.055	90	1.486.275.165	DINAS TPHPKP		
				<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	Jumlah Peta Kerawanan Pangan dan kerawanan pangan (dokumen)					1	18.611.121	1	18.611.121	1	18.611.121	3	55.833.363	DINAS TPHPKP		
				Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (bulan)					10	21.492.526	10	21.492.526	10	21.492.526	30	64.477.578	DINAS TPHPKP		
				<i>Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota</i>	Tertanganinya kerawanan pangan (%)					90	476.840.934	90	476.840.934	90	476.840.934	90	1.430.522.802	DINAS TPHPKP		

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
Setelah Perubahan Kepmendagri 050-5889/2021				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	kebijakan DKP kabupaten (dokumen)									1	10.849.315	1	32.547.945	DINAS TPHPKP		
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumusan kebijakan DKP kabupaten (kebijakan)									1	10.849.315	1	32.547.945	DINAS TPHPKP		
				Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik									3	10.849.315	3	32.547.945	DINAS TPHPKP		
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan									89,8	409.643.835	89,8	1.228.931.505	DINAS TPHPKP		
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah buku tentang informasi harga dan stok pangan (buku)									1	90.549.310	3	271.647.930	DINAS TPHPKP		
				Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan									13	11.816.649	23	35.449.947	DINAS TPHPKP		

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
				Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia										3	39.388.830	3	118.166.490	DINAS TPHPKP	
				Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan										365	27.572.181	365	82.716.543	DINAS TPHPKP	
				Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan										50	11.816.649	50	35.449.947	DINAS TPHPKP	
				<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun</i>	Tercapainya target konsumsi pangan (kkal/kapita perhari dan gr/kapita perhari)										319.049.525	AKE 1900 dan AKP57	319.049.525	AKE 1900 dan AKP57	DINAS TPHPKP	
				<i>sesuai dengan angka kecukupan gizi</i>																
				Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen)										2	208.760.801	89,9	626.282.403	DINAS TPHPKP	
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tertanganinya kerawanan pangan (%)										90	495.452.055	90	1.486.275.165	DINAS TPHPKP	
				<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	Jumlah Peta Kerentanan Pangan dan kerawanan pangan (dokumen)										1	18.611.121	3	55.833.363	DINAS TPHPKP	
				Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (dokumen)										13	21.492.526	13	64.477.578	DINAS TPHPKP	

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
				Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Tertanganinya kerawanan pangan (%)									90	476.840.934	90	1.430.522.802	DINAS TPHPKP		
				Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (laporan)									12	139.583.409	12	418.750.227	DINAS TPHPKP		
				Pelaksanaan pengadaan pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu kabupaten/kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)									12	337.257.525	12	1.011.772.575	DINAS TPHPKP		
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terpantaunya keamanan pangan segar (bulan)									10	44.054.795	30	132.164.385	DINAS TPHPKP		
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (bulan)									12	44.054.795	36	132.164.385	DINAS TPHPKP		
				Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten / kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina (dokumen)									12	14.684.931	12	44.054.793	DINAS TPHPKP		
				Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/ kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (sertifikat)									7	29.369.863	7	88.109.589	DINAS TPHPKP		

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
Sebelum perubahan	Meningkatkan kegiatan sektor pertanian	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	03.01.01	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi benih padi; Ton Jumlah produksi benih kentang Ton	60 4	60 4	1.000.000.000	60 4	1.000.000.000									DINAS TPHPKP	
			3.1.1.1	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Luas areal pengembangan benih unggul hektar	21	21	1.000.000.000	21	1.000.000.000									DINAS TPHPKP	
			03.01.02	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan	Produktivitas padi; kw/ha; Produktivitas jagung; kw/ha; Produktivitas kedelai kw/ha	64.50; 67.80; 13.00	64.65; 67.90; 14.00	1.375.000.000	64.75; 68.35; 15.00	1.375.000.000									DINAS TPHPKP	
			3.1.2.1	Peningkatan produksi, Produktivitas dan Produk Serealisa	- Jumlah pengadaan benih padi untuk budidaya jajar legowo; Kg; - Jumlah pengadaan alat pasca panen; unit; - Jumlah pengadaan benih jagung Kg;	11250.00; 7.00; 3000.00	11250.00; 7.00; 3000.00	875.000.000	11250.00; 7.00; 3000.00	875.000.000									DINAS TPHPKP	
			3.1.2.2	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu aneka kacang dan Umbi	Jumlah pengadaan benih aneka kacang dan umbi; Ton Jumlah pengadaan Alat pasca panen aneka kacang dan umbi unit	10 1	10 1	300.000.000	10 1	300.000.000									DINAS TPHPKP	
			3.1.3.1	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk buah-buahan	Jumlah pengadaan sarana produksi buah Batang	22500	22500	860.000.000	22500	860.000.000									DINAS TPHPKP	
			3.1.3.2	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Florikultura	Jumlah pengadaan sarana produksi florikultura Tangkai	1000	1000	350.000.000	1000	350.000.000									DINAS TPHPKP	
			3.1.3.3	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Sayuran	Jumlah pengadaan sarana produksi sayuran Kg	1000	1000	425.000.000	1000	425.000.000									DINAS TPHPKP	

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			3.1.3.4	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Biofarmaka	Jumlah pengadaan sarana produksi biofarmaka Kg	2500	2500	100.000.000	2500	100.000.000								DINAS TPHPKP		
			03.01.04	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (tebu) kw/ha	645	660	460.000.000	670	460.000.000								DINAS TPHPKP		
			3.1.4.1	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk tanaman semusim	Jumlah pengadaan bibit unggul (tebu) mata tunas	30000	30000	300.000.000	30000	300.000.000								DINAS TPHPKP		
			3.1.4.2	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Tanaman Tahunan	Jumlah pengadaan bibit unggul tanaman tahunan Batang	80000	6000	110.000.000	6000	110.000.000								DINAS TPHPKP		
			3.1.4.3	Penanganan pasca panen hasil perkebunan	Jumlah pengadaan alat pasca panen hasil perkebunan unit	5	1	50.000.000	1	50.000.000								DINAS TPHPKP		
			03.01.08	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Bidang Pertanian	produktivitas komoditi tembakau kw/ha	450	450	1.000.000.000	455	1.000.000.000								DINAS TPHPKP		
			3.1.8.1	Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau	Jumlah DEM benih varietas unggul dan budidaya tembakau yang dikelola unit	1	1	200.000.000	1	200.000.000								DINAS TPHPKP		
			3.1.8.2	Penanganan panen dan pasca panen bahan baku	Jumlah pengadaan peralatan panen dan pasca panen tembakau unit	2	2	400.000.000	2	400.000.000								DINAS TPHPKP		
			3.1.8.3	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	Jumlah pengadaan/rehabilitasi sarana dan prasarana usaha tani tembakau unit	4	2	230.000.000	2	230.000.000								DINAS TPHPKP		

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
			3.1.8.4	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan	Jumlah peserta Sekolah lapang budidaya tembakau Orang	60	60	120.000.000	60	120.000.000								DINAS TPHPKP	
			3.1.8.5	Penerapan Inovasi	Jumlah koordinasi sertifikais varietas tembakau kali	1	1	50.000.000	1	50.000.000								DINAS TPHPKP	
Setelah perubahan				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi padi dan pamelo (kw)					3.572.320; 155.000	7.830.000.000	3.611.300 ; 155.000	7.830.000.000	3.650.400 ; 155.000	7.830.000.000	10.834.020; 465.000	23.490.000.000		
				Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Provitasi padi dan pamelo (kw/ha)					65,35 ; 1	2.190.000.000	65,35 ; 1	2.190.000.000	65,35 ; 1	2.190.000.000	65,35;1	6.570.000.000		
				Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah sarana produksi biofarmaka, buah-buahan, florikultura, sayuran (kg; batang; tangkai; kg)					500; 15960; 2600; 3250	1.735.000.000	500; 15960; 2600; 3250	1.735.000.000	500; 15960; 2600; 3250	1.735.000.000	1500; 47.880; 78.000;9.750	5.205.000.000		
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengadaan benih padi dan alat pascapanen (kg; unit)					11.250; 7	1.175.000.000	11.250; 7	1.175.000.000	11.250; 7	1.175.000.000	33.750;21	3.525.000.000		
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya komoditas unggul di Magetan (komoditas)					8	2.460.000.000	8	2.460.000.000	8	2.460.000.000	8	7.380.000.000		
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Luas areal pengembangan benih unggul (hektar)					21	1.000.000.000	21	1.000.000.000	21	1.000.000.000	21	3.000.000		
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan sarana dan prasarana produksi perkebunan (kelompok)					5	1.460.000.000	5	1.460.000.000	5	1.460.000.000	15	4.380.000.000		

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
				bunan																
			3.1.5.1	Peningkatan Sarana Prasarana Lahan (Rehab Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi)	Jumlah pembangunan jalan usaha tani Lokasi	20	30	4.199.800.000	30	4.199.800.000								DINAS TPHPKP		
			3.1.5.2	Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi	Jumlah pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana irigasi yang terbangun Lokasi	80	45	6.463.900.000	45	6.463.900.000								DINAS TPHPKP		
			3.1.5.3	Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi (DAK)	Jumlah pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana irigasi yang terbangun Lokasi	0	0	0	0	0								DINAS TPHPKP		
			3.1.5.4	Pengadaan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Jumlah pengadaan alsintan unit	12	12	312.500.000	12	312.500.000								DINAS TPHPKP		
			3.1.5.5	Pendampingan Pembiayaan Pertanian/Perkebunan (Pinjaman Daerah)	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembiayaan pertanian/perkebunan dokumen	0	4	100.000.000	4	100.000.000								DINAS TPHPKP		
			3.1.5.6	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah dokumen penyusunan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) dan pengadaan pupuk dokumen	18	19	180.000.000	19	180.000.000								DINAS TPHPKP		
			3.1.5.7	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian (LP2B)	Jumlah dokumen peraturan LP2B dokumen	2	2	250.000.000	2	250.000.000								DINAS TPHPKP		
			03.01.09	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	persentase komoditas pertanian/perkebunan unggulan yang difasilitasi promosi %	50	50	850.000.000	50	850.000.000								DINAS TPHPKP		

			3.1.9.1	Pengembangan pusat-pusat etalase/eksebsisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	2	2	450.000.000	2	450.000.000								DINAS TPHPKP
					memasarkan hasil produksi pertanian/perkebunan Lokasi													
			3.1.9.2	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah promosi hasil pertanian kali	6	6	400.000.000	6	400.000.000								DINAS TPHPKP
			01.01.01	Program Pengembangan Agrowisata	Persentase luas lahan agrowisata yang dikembangkan %	11	44	1.645.000.000	61	1.645.000.000								DINAS TPHPKP
			1.1.1.1	Penyediaan sarana dan prasarana agrowisata	Jumlah Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana agrowisata Lokasi	2	2	1.645.000.000	2	1.645.000.000								DINAS TPHPKP
Setelah perubahan				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanian						2,47	13.801.300.000	2,48	13.801.300.000	2,49	13.801.300.000	2,49	41.403.900.000
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase lahan yang terlayani pupuk bersubsidi (%)						90	742.600.000	90	742.600.000	90	742.600.000	90	2.227.800.000
				Pengelolaan LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan	Jumlah dokumen peraturan LP2B (dokumen)						1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	750.000.000
				Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah pengadaan alat mesin pertanian (unit)						12	492.600.000	12	492.600.000	12	492.600.000	36	14.778.000.000
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Penambahan luas areal yang terlayani irigasi (ha)						600	13.058.700.000	600	13.058.700.000	600	13.058.700.000	1800	39.176.100.000
				Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan JIUT	Jumlah Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan JIUT						45	6.463.900.000	45	6.463.900.000	45	6.463.900.000	135	19.391.700.000
				Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan JUT	Jumlah Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan JUT						30	4.199.800.000	30	4.199.800.000	30	4.199.800.000	90	12.599.400.000

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya					1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	3	2.250.000.000			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					2	1.645.000.000	2	1.645.000.000	2	1.645.000.000	2	4.935.000.000			
Setelah Perubahan Keppmendagri 050-5889/2021				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanaman					2,47	13.801.300.000	2,48	13.801.300.000	2,49	13.801.300.000	2,49	41.403.900.000			
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase lahan yang terlayani pupuk bersubsidi (%)					90	742.600.000	90	742.600.000	90	742.600.000	90	2.227.800.000			
				Pengelolaan LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dokumen)									1	250.000.000	1	750.000.000			
				Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (laporan)									13	492.600.000	13	14.778.000.000			
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Penambahan luas areal yang terlayani irigasi (ha)									600	13.058.700.000	1800	39.176.100.000			

				Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan JUT	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (unit)									53	6.463.900.000	53	19.391.700.000			
				Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan JUT	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)									66	4.199.800.000	66	12.599.400.000			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan Dipelihara (unit)									1	750.000.000	3	2.250.000.000			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (lokasi)									2	1.645.000.000	2	4.935.000.000			
Sebelum perubahan			03.01.06	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	cakupan binaan kelompok tani dan gapoktan %	20	20	150.000.000	20	150.000.000									DINAS TPHPKP	
			3.1.6.1	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah poktan dan gapoktan yang mendapat binaan Kelompok	340	340	150.000.000	342	150.000.000										DINAS TPHPKP
			03.01.07	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persentase penyuluh pertanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas %	100	100	550.000.000	100	550.000.000										DINAS TPHPKP
			3.1.7.1	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat teknis dan petani yang mendapat binaan Orang	2091	2091	550.000.000	2091	550.000.000										DINAS TPHPKP
Setelah perubahan				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah desa yang mendapatkan kegiatan penyuluhan pertanian (desa)						231	700.000.000	231	700.000.000	231	700.000.000	231	2.100.000.000		
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan (orang)						1358	700.000.000	1358	700.000.000	1358	700.000.000	1.358	2.100.000.000		
				Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah jenis pertemuan yang diadakan (jenis pertemuan)						7	550.000.000	7	550.000.000	7	550.000.000	7	1.650.000.000		

			03.01.03	Program Peningkatan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	100	170.000.000	100	170.000.000									DINAS TPHPKP
			3.1.3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan dokumen	0	6	20.000.000	6	20.000.000									DINAS TPHPKP
			3.1.3.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data statistik pertanian dokumen	19	19	150.000.000	19	150.000.000									DINAS TPHPKP
			04.01.04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	100	1.720.000.000	100	1.770.000.000									DINAS TPHPKP
			4.1.4.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang dibangun unit	1	1	750.000.000	1	750.000.000									DINAS TPHPKP
			4.1.4.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pekarangan Kantor Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pekarangan Kantor Dinas unit	1	1	50.000.000	1	50.000.000									DINAS TPHPKP
			4.1.4.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara unit	80	80	275.000.000	80	275.000.000									DINAS TPHPKP
			4.1.4.4	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor untuk BPP dan Kecamatan unit	30	18	200.000.000	18	200.000.000									DINAS TPHPKP
			4.1.4.5	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara unit	5	5	45.000.000	5	45.000.000									DINAS TPHPKP
			4.1.4.6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara unit	4	4	400.000.000	4	450.000.000									DINAS TPHPKP
Setelah perubahan				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan Masyarakat						76	17.451.619.049	77	17.451.619.049	78	17.451.619.049	79	52.354.857.147	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN (bulan)						12	15.071.619.049	12	15.071.619.049	12	15.071.619.049	36	45.214.857.147	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN (bulan)						12	15.071.619.049	12	15.071.619.049	12	15.071.619.049	36	45.214.857.147	

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat (orang)					75	170.000.000	25	25.000.000	75	150.000.000	175	345.000.000		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat (orang)					75	170.000.000	25	25.000.000	75	150.000.000	175	345.000.000		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercukupinya kegiatan operasional kantor (%)					100	486.000.000	100	486.000.000	100	486.000.000	100	1.458.000.000		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (bulan)					12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	36	18.000.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)					12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	36	600.000.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (bulan)					12	34.000.000	12	34.000.000	12	34.000.000	36	102.000.000		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (bulan)					12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	36	48.000.000		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (bulan)					12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	36	15.000.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (bulan)					12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	36	675.000.000		
				Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen data statistik pertanian; jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan; jumlah survey IKM (dokumen; kali)					19;4;1	190.000.000	19;4;1	190.000.000	19;4;1	190.000.000	57;12;3	570.000.000		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data statistik pertanian; jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan; jumlah survey IKM (dokumen; kali)					19;4;1	190.000.000	19;4;1	190.000.000	19;4;1	190.000.000	57;12;3	570.000.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya kegiatan operasional kantor (%)					100	759.000.000	100	759.000.000	100	759.000.000	100	2.277.000.000		

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)					12	89.000.000	12	89.000.000	12	89.000.000	36	267.000.000		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)					12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	36	135.000.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)					12	625.000.000	12	625.000.000	12	625.000.000	36	1.875.000.000		

				<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Tercukupinya kegiatan operasional kantor (%)					100	7.750.00000	100	7.750.00000	100	7.750.00000	100	23.250.000.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (unit)					79	187.000.000	79	187.000.000	79	187.000.000	79	561.000.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara (unit)					1	88.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000	1	264.000.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Yang dipelihara (unit)					1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	1.350.000.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Pekarangan Dinas (unit)					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000		
Setelah Perubahan Kependagri 050-5889/2021				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan Masyarakat									78	17.451.619.049	79	52.354.857.147		

				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN (bulan)										12	15.071.619.049	36	45.214.857.147		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)										131	15.071.619.049	131	45.214.857.147		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat (orang)										75	150.000.000	175	345.000.000		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)										2	150.000.000	2	345.000.000		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercukupinya kegiatan operasional kantor (%)										100	486.000.000	100	1.458.000.000		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)										1	6.000.000	1	18.000.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)										1	200.000.000	1	600.000.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)										1	34.000.000	1	102.000.000		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)										1	16.000.000	1	48.000.000		

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)									1	5.000.000	1	15.000.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)									1	225.000.000	1	675.000.000		
				Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen data statistik pertanian; jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan; jumlah survey IKM (dokumen; kali)									19;4;1	190.000.000	57;12;3	570.000.000		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)									8	190.000.000	8	570.000.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya kegiatan operasional kantor (%)									100	759.000.000	100	2.277.000.000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)									12	89.000.000	36	267.000.000		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)									1	45.000.000	1	135.000.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)									12	625.000.000	12	1.875.000.000		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya kegiatan operasional kantor (%)									100	7.750.00000	100	23.250.000.000		

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)									5	187.000.000	5	561.000.000			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)									1	88.000.000	1	264.000.000			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)									5	450.000.000	5	1.350.000.000			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)									1	50.000.000	1	150.000.000			
	Total							24.791.200.000	24.716.200.000	24.861.200.000	24.716.200.000	24.841.200.000	123.926.000.000					DINAS TPHPKP		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PANGAN DAN PERTANIAN

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD 2018-2023 yang dijabarkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Indikator kinerja dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian visi dan misi Bupati melalui pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Magetan pada kurun waktu 2018-2023.

Penetapan indikator kinerja Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan
2. Penguatan Cadangan Pangan
3. Penanganan Daerah Rawan Pangan
4. Nilai PDRB Sektor Pertanian
5. Produksi komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian *output* dan *outcome* program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan dapat dilihat pada Tabel Indikator Kinerja berikut.

Tabel T-C.28.

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN & KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2019-2023**

No	Aspek/Fokus / Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi	Target RPJMD					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber Data
			kinerja pada awal periode RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023		
			2018							
	PANGAN									
1	Skor Pola Pangan Harapan (SDGs)	%	89,3	89,4	89,5	89,7	89,9	90	90	Dinas TPHPKP
2	Penguatan cadangan pangan	%	70	75	80	85	90	95	95	Dinas TPHPKP
3	Penanganan daerah rawan pangan	%	-	20	40	60	80	100	100	Dinas TPHPKP
	PERTANIAN									
4	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Juta Rp.	3.554.588,73	3.652.424,43	3.750.260,12	3.848.095,82	3.945.931,52	4.043.767,21	4.043.767,21	BPS
	Produksi pertanian									
5	• Padi	Kw	3.456.100	3.494.720	3.533.460	3.968.594	3.611.300	3.650.400	3.650.400	Dinas TPHPKP
6	• Jagung	Kw	1.093.680	1.103.300	1.112.960	1.122.660	1.132.400	1.142.180	1.142.180	Dinas TPHPKP
7	• Kedelai	Kw	3.456.100	3.494.720	3.533.460	14.430	7.200	7.200	7.200	Dinas TPHPKP
8	• Ubi Jalar	Kw	22.100	24.150	26.250	28.400	30.600	32.850	32.850	Dinas TPHPKP

9	• Kelapa	Kg	1.231.200	1.231.500	1.231.800	1.232.100	1.232.400	1.232.700	1.232.700	Dinas TPHPKP
10	• Kopi	Kg	194.100	199.000	204.000	209.000	214.000	216.000	216.000	Dinas TPHPKP
11	• Kakao	Kg	283.660	290.000	300.000	310.000	320.000	330.000	330.000	Dinas TPHPKP
12	• Tebu	Kw	528.900	535.350	541.800	548.250	554.700	561.225	561.225	Dinas TPHPKP
13	• Tembakau	Kw	2.443	2.468	2.492	2.517	2.542	2.568	2.568	Dinas TPHPKP
14	• Jeruk Besar	Kw	187.773	189.651	191.547	150.000	155.000	155.000	155.000	Dinas TPHPKP
15	• Stroberi	Kw	175	176	178	180	182	184	184	Dinas TPHPKP
16	• Sayuran (Bw. Merah, Bw. Putih, Cabe, Kentang, Wortel)	Kw	315.900	319.059	322.250	325.472	328.727	332.014	332.014	Dinas TPHPKP

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi produksi, produktifitas pertanian, terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Magetan.

Dengan adanya Dokumen Perubahan Renstra ini, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan;

1. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dimana sasaran dan indikator kinerja yang tertuang didalam Perubahan Renstra merupakan tindak lanjut dari sasaran dan indikator kinerja yang tertuang didalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
2. Kepala Dinas dan Staf karyawan yang berada dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan segala hal yang tertuang didalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan.

Magetan, 2022

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN



Ir. USWATUL CHASANA, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660904 199602 2 001